

Tindakan Indonesia dan Arab Saudi dalam Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang pada Tahun 2019

Ilham Rilin Fiadi

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ilhamrilinear@gmail.com

Abstraksi

Isu kemanusiaan terhadap Uighur di Xinjiang menjadi perhatian global. Pasalnya terdapat dugaan-dugaan terhadap kebijakan China yang bersifat represif dan diskriminatif terhadap Muslim Uighur. Dugaan-dugaan tersebut berupa terdapatnya penyiksaan, kawin paksa, penangkapan di luar hukum, sterilisasi paksa, dan aborsi paksa yang dilakukan oleh pemerintah China. Segala bentuk penyiksaan tersebut diduga dilakukan di sebuah “Kamp Pendidikan Ulang”, yang mana kamp tersebut dibuat oleh pemerintah China dengan tujuan memberantas segala macam gerakan separatisme yang berasal dari komunitas muslim Uighur. Merespon isu kemanusiaan tersebut, terdapat 22 negara yang menandatangani surat bersama yang ditujukan ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pernyataan keprihatinan akan permasalahan kemanusiaan tersebut. Namun, membalas pernyataan tersebut, terdapat juga 50 negara yang mendukung kebijakan China. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Indonesia dan Arab Saudi dalam isu permasalahan kemanusiaan Uighur di Xinjiang pada tahun 2019, yang mana keduanya adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam menindak isu tersebut.

Kata Kunci: Arab Saudi, China, Indonesia, Hak Asasi Manusia, Uighur

Abstract

The issue of humanity towards the Uyghurs in Xinjiang has become a global concern. The reason is that there are the allegations against China's policies, which were repressive and discriminatory towards Uyghur Muslims. The allegations are in the form of coercion, forced marriages, unlawful arrests, forced sterilization, and forced abortions carried out by the Chinese government. All of the aforementioned forms are carried out in a “Re-education Camp”, which is the Chinese government created the camp with the aim of eradicating all kinds of separatist movements originating from the Uighur Muslim community. Responding to humanitarian issues in 2019, there were 22 countries in the joint letter addressed to UNHRC as a statement that it would be beneficial to humanity. According to the statement, however, there are also 50 countries that support China's policy. This paper aims to analyze the actions of Indonesia and Saudi Arabia on the issue of Uighur humanitarian problems in Xinjiang in 2019, both of which are countries with a majority Muslim population in the world. However, both have differences in addressing the issue.

Keywords: Saudi Arabia, China, Indonesia, Human Rights, Uighur

Pendahuluan

Manusia sejatinya memiliki hak asasi yang telah melekat sejak lahir yang bersifat universal, utuh, dan tidak dapat diambil oleh siapapun di dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan oleh John Locke sebagai hak yang diberikan secara alamiah kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna, serta hak dalam mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya (Locke, 1689). Adapun beberapa hak yang dimiliki manusia secara fundamental yang mencakup hak ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Hal tersebut sebelumnya telah

tertuang dalam Deklarasi Universal HAM yang diproklamasikan pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB. Dalam kurun waktu dewasa ini, perkembangan progresif mengenai penegakan HAM tidak hanya terlepas dari peran negara yaitu pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan dan menjamin HAM, namun juga masyarakat internasional yang memiliki tanggung jawab bersama tersebut. Di samping perkembangan progresif penegakan HAM, pada abad 21 ini masih terdapat beberapa isu pelanggaran terhadap HAM yang salah satunya mengenai perlakuan otoritas China terhadap Uighur di Xinjiang. Isu pelanggaran yang dimaksud yaitu berupa terdapatnya kekerasan, sterilisasi paksa, aborsi paksa, penangkapan di luar hukum, dan indoktrinasi politik yang terjadi di kamp edukasi ulang yang dibuat oleh pemerintah China (The Associated Press, 2020).

Xinjiang adalah wilayah luas yang terkurung daratan berlokasi di barat laut China dan dekat dengan Asia Tengah. Di wilayah ini terdapat banyak penduduk minoritas China, yang salah satunya adalah etnis Uighur. Terdapat ketidaksamaan mengenai klaim historis yang lebih besar atas wilayah Xinjiang, Uighur meyakini bahwa nenek moyang mereka telah menjadi penduduk asli daerah tersebut, sementara pemerintah menganggap wilayah Xinjiang telah dimiliki China sejak sekitar 200 SM pada masa Dinasti Han. Kebijakan China menganggap etnis Uighur juga bukan penduduk asli (pribumi) atas wilayah Xinjiang, melainkan yang menjadi penduduk asli tersebut adalah etnis Han. Uighur dianggap hanya sebagai minoritas *nasional* China dan tidak memiliki hak istimewa atas tanah di bawah hukum (Gladney, 2004). Kebijakan minoritas etnis China terkini adalah berdasarkan pada tindakan afirmatif, namun tindakan tersebut telah dikurangi sejak 2019 oleh pemerintah China (Lau, 2019).

Bersama dengan tindakan pemerintah tersebut, terdapat beberapa anggapan yang muncul dari masyarakat internasional yang salah satunya berasal dari *Human Rights Watch*, sebuah organisasi internasional non-pemerintah (Non-Governmental Organization), yang menganggap terdapat sistem multi-tier pengendalian, pengawasan, dan penindasan praktek keagamaan etnis Uighur yang dilakukan oleh China (Human Right Watch, 2005). Pihak China sendiri mengonfirmasi bahwa mereka telah menahan lebih dari 13.000 orang-orang yang mereka sebut 'militan' di Xinjiang setidaknya sejak tahun 2014 (Blanchard, 2019). Sementara itu juga diestimasikan lebih dari 100,000 etnis Uighur yang telah ditahan di Kamp Pendidikan Ulang (Phillips, 2018). Selain Kamp Pendidikan Ulang, pemerintah China juga memberlakukan operasi pengawasan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *Drone* di Xinjiang (Ries, 2020). Pihak China merespon atas tuduhan negatif tersebut dengan menjustifikasi langkah-langkah tersebut adalah penting yang ditujukan untuk mengamankan dari ancaman gerakan separatis atau teror yang sering kali muncul oleh kelompok separatis ekstrimis di Xinjiang (Huang, 2016). Indonesia dan Arab Saudi merupakan negara yang tidak hanya memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar, namun juga memiliki peran yang penting di Kawasan masing-masing.

Bersama dengan isu pelanggaran HAM di Xinjiang terhadap etnis Uighur ini, tindakan kedua negara tersebut juga dirasa cukup penting untuk diperhatikan dari sisi kepentingan nasional kedua negara tersebut, terlebih Etnis Uighur juga memiliki kesamaan dalam corak budaya dan agama Muslim. Negara-negara di dunia memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga perilakunya pun juga beragam. Pada dasarnya kepentingan nasional muncul dari adanya kebutuhan dari suatu negara. Kepentingan nasional merupakan pilar utama politik luar negeri suatu negara. Dengan begitu, kepentingan nasional dapat digunakan untuk menganalisa politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011). Untuk melihat sikap dari Arab Saudi dan Indonesia terhadap isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur di Xinjiang, kepentingan nasional dirasa dapat membantu menjelaskan sikap yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dalam sebuah penelitian, seperti motivasi, tindakan, perilaku, dan lain-lain, serta menggunakan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu (Barlian, 2016). Adapun pengertian penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk masalah sosial (Cresswell, 2014). Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang berasal dari artikel jurnal, portal berita, dan buku. Sumber data yang dicari akan berfokus pada bahasan mengenai isu pelanggaran HAM terhadap Uighur dan keterkaitan Indonesia dan Arab Saudi dalam menindak isu tersebut pada tahun 2019.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Historis Konflik Xinjiang

Xinjiang merupakan sebuah daerah otonom yang berada di utara barat China. Selain etnis Uighur, terdapat grup etnis lain yang juga bertinggal di Xinjiang, seperti Kazakhs dan Kyrgyz. Etnis Uighur sendiri bukanlah etnis dan berbudaya Tionghoa, tetapi keturunan orang Turki, yang mana bahasa mereka lebih dekat dengan bahasa Uzbek dan bahasa Turki, dan secara sejarah dan budaya adalah muslim. Bagi orang-orang Uighur, Xinjiang dianggap sebagai kampung halaman mereka dan menyebutnya sebagai Turkestan Timur atau juga disebut daerah *Sharqi Turkestan* (Dillon, 2020).

Etnis Uighur telah tinggal di Turkistan Timur sejak ekspansi besar orang-orang Turki dari stepa Mongolia yang dimulai pada abad ke-16 M. Hal ini bisa ditarik dari catatan sejarah di abad ke-11 yang mana aliran Islam Sufi menjadi dominan ketika para elit penguasa sebelumnya yang memeluk agama budha dikalahkan dalam pertempuran yang terjadi di sana. Puncak supremasi Sufi dimulai sekitar akhir abad ke-16 di mana kekuasaan jatuh pada Khoja yang merupakan tokoh pemimpin ordo Naqshbandi. Namun, pada tahun 1759 kekuasaan Khoja digulingkan oleh dinasti Qing ketika dinasti itu melakukan perluasan wilayah ke Asia Tengah. Dinasti Qing sendiri telah berkuasa dari tahun 1644 sampai tahun 1911 atas wilayah China. Dinasti Qing memasukan Turkestan Timur ke dalam wilayah kekaisaran China sekitar pertengahan abad ke-18. Pemerintahan Qing mendirikan organisasi militer dan birokrasi di Turkestan Timur dan memerintahkan elit muslim yang berbahasa Turki, serta sejak itu mulai menamakan wilayah tersebut dengan nama "*xinjiang*" yang memiliki arti "sebuah perbatasan baru" dalam bahasa Mandarin. Secara resmi, Xinjiang telah digabungkan ke dalam wilayah kekaisaran China pada tahun 1884. Terdapat catatan sebuah pemberontakan yang terjadi berupa usaha pendirian pemerintahan independent di Kashgar oleh Yakub Beg, seorang Panglima Perang Uzbek, pada tahun 1867. Namun pada tahun 1878, rezim tersebut dijatuhkan oleh tentara dinasti Qing.

Pada tahun 1911 di mana dinasti Qing runtuh, Xinjiang tetap menjadi bagian dari negara Republik China yang baru diproklamasikan. Setelahnya kembali terdapat upaya yang ditujukan untuk membuat negara Muslim independent ketika itu, misalnya Republik Turkestan Timur yang berbasis di Kashgar pada sekitar tahun 1930 dan di Ghulja, atau *Yining* dalam bahasa Mandarin, di sebelah utara Xinjiang antara tahun 1944 dan tahun 1949. Perang sipil yang terjadi pada tahun 1949 mengakibatkan Nasionalis Guomintang di bawah kepemimpinan Chiang Kai-Shek dikalahkan, dan Mao Zedong memproklamkan Republik Rakyat China atas nama Partai Komunis China. Sekitar tahun 1950-an perlawanan kembali bermunculan khususnya di sebelah selatan Xinjiang. Kemudian pada tahun 1955, RRC membuat Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Revolusi Kebudayaan (Cultural

Revolution) diluncurkan pada tahun 1966, yang mana hal ini membuat otoritas pusat melemah serta memancing etnis Uighur menuntut kemerdekaan.

Demonstrasi yang terjadi pada tahun 1995 di Yining mengarah pada pengidentifikasian konflik yang terjadi di Xinjiang sebagai ancaman bagi keutuhan China. Kemudian pada tahun 2009 terjadi bentrokan antara etnis Uighur dan etnis Han yang memakan banyak korban jiwa, dan peristiwa ini membuat etnis Uighur yang terlibat ditahan secara paksa, dan beberapa di antaranya dieksekusi. Merespon konflik yang sering terjadi, pada tahun 2014, Pemerintah China memulai program “*Strike Hard Campaign against Violent Extremism*”. Sejak itu tindakan represif negara semakin intensif. Dalam pemberlakuannya, seorang yang diduga menjadi simpatisan gerakan separatism, mengadvokasi negara Uighur, terlibat dalam ‘aktivitas keagamaan ilegal’, akan segera ditahan. Diperkirakan sebanyak 11 juta etnis Uighur ditahan di Xinjiang pada tahun 2017 (Cumming-Bruce, 2018). Menurut laporan dari *Human Right Watch* pada tahun 2018, menemukan kebijakan yang dilakukan oleh China berupa penahanan massal, indoktrinasi paksa, penyiksaan, dan pengawasan massal di Xinjiang (HRW, 2018). Pemerintah Xinjiang juga dikabarkan melakukan pengumpulan DNA dan sampel suara sebagai upaya melacak keberadaan penduduk Xinjiang, namun China menghiraukan tuduhan tersebut (Wang, 2020). Pemerintah China juga membantah tuduhan-tuduhan tersebut, dan menganggap kamp-kamp penahanan tersebut sebagai sebuah tempat Pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja. Namun, bukti-bukti yang jelas sulit ditemukan sebab China sendiri tidak memberikan izin masuk kepada kelompok independent dari PBB, media massa, dan organisasi pembela HAM (HRW, 2018).

Kemunculan 22 Negara Penentang dan 50 Negara Pendukung Kebijakan China

Kebijakan China yang dianggap mencederai HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang mendapatkan perhatian dari negara-negara Barat. Negara-negara Barat tersebut mengecam perlakuan pemerintah China terhadap etnis Uighur yang merupakan minoritas di Xinjiang. Sikap ini awalnya digagas oleh Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa PBB dan semua negara memiliki kewajiban yang sama dalam mengangkat isu-isu semacam ini. Menteri luar negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa PBB harus dapat memonitor dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan mencari akses bagi Komisararis Tinggi HAM PBB untuk dapat ke wilayah barat Xinjiang. Seruan Amerika Serikat itu awalnya mendapat dukungan langsung dari empat negara Eropa, yaitu Jerman, Kanada, Inggris, dan Belanda (CNN Indonesia, 2019).

Amerika Serikat bersama dengan Kanada, Jerman, Belanda, dan Inggris menyelenggarakan diskusi panel dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang pada tanggal 13 Maret 2019 di Jenewa, Swiss (U.S Mission Geneva, 2019). Kemudian, pada tanggal 8 Juli 2019, dikeluarkannya surat bersama pertama (*first joint letter*) ke Sidang ke-41 Dewan HAM PBB. Di dalam surat tersebut menyatakan keprihatinan kolektif atas pengawasan yang luas, pembatasan kebebasan beragama, dan penahanan sewenang-wenang dalam skala besar terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Lalu dalam surat tersebut juga mendesak China agar menegakan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya, serta menyerukan terbukanya akses masuk ke Xinjiang bagi pengamat independent, termasuk Komisararis Tinggi PBB. Negara-negara yang menandatangani surat pertama tersebut terdiri dari negara-negara maju dan sebagian besar anggota dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), serta memiliki hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Adapun negara-negara yang menandatangani surat tersebut yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Litunia, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Dalam merespon tindakan pengecaman yang berasal dari negara-negara Barat terhadap China sendiri, China telah berupaya sebelumnya untuk mengumpulkan dukungan suara simpatisan

di PBB berkaitan dengan isu HAM. Hal itu dimulai dari awal tahun 2010, di mana China memulai memberikan suara pada resolusi UNHCR bersama dengan kelompok negara yang disebut *Like-Minded Group of Developing Countries* (LMG). LMG sendiri terdiri dari negara-negara berkembang yang mana memiliki ciri khas pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter penuh dan semi-otoriter. Negara-negara ini bersama berusaha merespon kritik dan mempromosikan pandangan HAM yang berpusatkan pada kedaulatan negara dan pembangunan ekonomi (Permanent Mission of PRC to UN, 2019).

China sebelumnya telah berusaha mempengaruhi secara langsung delegasi dari negara-negara berkembang dan pada tanggal 7 maret 2019, China mengirimkan surat kepada duta besar lain untuk tidak berpartisipasi ataupun hadir pada acara Panel Diskusi yang diajukan oleh Amerika Serikat dan keempat negara Barat tersebut dalam membahas pelanggaran HAM di Xinjiang pada 13 Maret 2019 di Jenewa, Swiss. Surat tersebut menyatakan bahwa acara tersebut berisikan tuduhan yang tidak berdasar dan berusaha mengintervensi urusan domestik China serta provokasi yang konfrontatif (HRW, 2019). Lebih lagi pada surat tersebut berisikan tekanan bagi penerimanya untuk dapat terpeliharanya hubungan bilateral dan multilateral dengan China. Kemudian, pada tanggal 12 Juli 2019, terdapat 37 negara yang mengeluarkan dan menandatangani sebuah surat bersama kedua yang ditujukan kepada UNHRC sebagai surat tandingan atas surat pertama yang berasal dari negara-negara Barat (Xinhua, 2019). Namun, Qatar yang sebelumnya menjadi penandatangan, kemudian menarik diri dari penandatangan surat bersama kedua tersebut (Younes, 2019). Dan kemudian muncul 13 negara dan otoritas Palestina sebagai penandatangan, yang dengan ini jumlah penandatangan surat kedua tersebut menjadi 50 pendukung (Yellinek & Chen, 2019).

Dikeluarkannya surat kedua ini, bermaksud mengekspresikan dukungan atas kebijakan China di Xinjiang. Dalam surat ini berisikan penegasan terhadap kerja UNHRC yang harus dilakukan secara objektif, tidak konfrontatif, dan tidak dipolitisasi. Di surat kedua ini juga berisi pujian atas “prestasi luar biasa” China dalam menjaga dan mempromosikan HAM melalui program pembangunannya. Kemudian juga terdapat seruan yang ditujukan kepada negara-negara untuk menahan diri dalam mengeluarkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap China.

Hubungan Indonesia dan China

Pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai “negara berkekuatan menengah” terhadap lingkungan internasional. Konsep yang dikenalkan oleh SBY pada 2012 tersebut dimaksudkan sebagai penyambung negara berkembang dan negara maju. Namun pada saat itu, Indonesia sendiri terlihat ikut berambisi dengan negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dan posisinya menjauh dari Amerika Serikat (Sriyanto, 2018). Demikian sampai pada terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Ke-tujuh Indonesia, gagasan “negara berkekuatan menengah” kembali menjadi identitas Indonesia pada kancah internasional. Meskipun identitas tersebut sama dengan pemerintahan sebelumnya, namun terdapat perbedaan pada sisi kebijakan luar negeri Indonesia pada kepemimpinan Joko Widodo.

Jika pada masa pemerintahan Presiden SBY sebelumnya mempromosikan slogan “*a thousand friends, no enemies*” pada kebijakan luar negerinya, maka pada pemerintahan Joko Widodo slogan tersebut dengan tegas dinyatakan berakhir. Alasannya, slogan tersebut dirasa memiliki jarak antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dalam hal kebutuhan dalam negeri Indonesia sendiri (Andika, 2016). Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa penyelesaian permasalahan kebutuhan domestik Indonesia cenderung sulit atau lemah dikarenakan kebijakan luar negeri Indonesia berada di tingkatan yang lebih tinggi. Maka di sini Indonesia menjadi negara berkekuatan menengah yang cenderung memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri. Kepentingan nasional

menjadi prioritas Indonesia karena dianggap masih terdapat banyak permasalahan kebutuhan internal negara yang belum teratasi dengan baik (Madu, 2015).

Hubungan Indonesia-China memang terlihat surut pada pasca tahun 1965. Namun, dikarenakan arah pembangunan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pada pembangunan infrastruktur berdasarkan program Nawacita dan gagasan Poros Maritim Dunia, maka ini mengarah pada usaha Indonesia dalam pencarian dana pembangunan tersebut, dan tentunya hal ini mengarah pada naiknya intensitas hubungan Indonesia-China (Sukma, 2009). Prioritas pada pembangunan infrastruktur dikarenakan adanya anggapan bahwa infrastruktur Indonesia telah tertinggal dan menjadi faktor krusial yang menyebabkan perluasan kesenjangan ekonomi dan penurunan daya saing ekonomi Indonesia. Kemitraan ini, antara Indonesia dengan China, dalam sumber pendanaan ini membuat karakteristik kemitraan tersebut lebih terlihat materialistik.

Dalam hal investasi pada periode 2019, Singapura menjadi negara investor terbesar dalam urutan pertama di Indonesia, dan disusul oleh China sebagai investor terbesar kedua di Indonesia. China sendiri berkontribusi sebesar 16,8% dari total investasi di Indonesia, dengan total sebanyak 2.130 proyek (BKPM, 2019). Sedangkan dalam hal perdagangan, China menjadi mitra dagang utama terbesar Indonesia pada periode 2019. Total angka perdagangan Indonesia dan China juga terbilang besar, yaitu mencapai US\$72,8 miliar. Besarnya total investasi China di Indonesia tentu tidak lepas dari adanya kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) China (Rakhmat & Nughroho, 2019). Selain dalam hubungan ekonomi, Indonesia juga memelihara hubungan politiknya dengan China di tingkat internasional. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk upaya, terutama, menyeimbangi kekuatan negara-negara barat melalui dukungan politik China (Kelemen & Turcsanyi, 2020).

Hubungan Arab Saudi dan China

Arab Saudi menjadi negara yang sangat penting dalam hal kepemimpinan di dunia Muslim. Kepemimpinan Arab Saudi dapat dilihat dari arah kebijakan luar negerinya yang menekankan kepada beberapa prinsip pentingnya. Prinsip kebijakan luar negeri ini di antaranya komitmen Arab Saudi terhadap Muslim secara global, non-intervensi, mendukung deradikalisasi Muslim dan melawan bentuk ekstrimisme. Prinsip-prinsip ini timbul dikarenakan latar belakang sejarah dan peradaban, Identitas, dan kewajiban terhadap Islam sebagai agama. Arab Saudi juga telah berabad-abad menjaga komitmennya terhadap Islam dan Muslim, bahkan konstitusi negara Arab Saudi menyatakan bahwa negara harus memelihara aspirasi, solidaritas, dan harmoni bangsa Arab dan Muslim, serta menjaga hubungan dengan negara-negara sahabat. Terlebih Arab Saudi menjadi pemain kunci di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan juga setiap tahunnya sekitar satu miliar umat muslim di Dunia mengunjungi negara ini untuk melaksanakan ibadah Haji atau Umrah, hal ini membuat Kerajaan Arab Saudi bertanggung jawab serius terhadap semua muslim di Dunia. Dengan demikian peran kepemimpinan Arab Saudi di dunia Muslim ini diakui.

Dalam hubungannya dengan China, Arab Saudi menjadi negara mitra dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Di proyek ini, Arab Saudi menerima investasi mulai dari infrastruktur hingga telekomunikasi. Banyak kesepakatan antara Arab Saudi dan China yang telah dilakukan sehingga membuat China sebagai mitra dagang terbesar sekaligus mitra utama Arab Saudi dalam Visi rancangan pembangunannya pada tahun 2030. Terdapat juga sebuah kerjasama oleh China ke Arab Saudi senilai US\$28 miliar, yang mana membuat semakin bergantungnya dan berusaha mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan China (Navlakha, 2019). Arab Saudi sendiri menyatakan telah terdapat sekitar 35 nota kesepahaman tidak terikat terkait transportasi, pertambangan, perdagangan, dan energi (Xinhua, 2019). Ekonomi Arab Saudi bergantung pada ekspor produk sumber daya alam. Sebetulnya, ketergantungan ekonomi pada China adalah faktor umum di Timur Tengah. Demikian, menjaga pinjaman murah, akses pasar, dan barang-barang

konsumsi yang menguntungkan ekonomi, Arab Saudi harus menjaga hubungannya dengan China tetap positif.

Tindakan Indonesia

Isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dianggap sangat sensitif bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Dalam menindak isu tersebut, Indonesia sangat berhati-hati dalam memutuskan langkah yang akan diambilnya. Dalam kehati-hatian itu pun akhirnya membuat Indonesia melakukan diplomasi lunak (*soft diplomacy*) kepada China. Sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 2018, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Duta Besar China untuk Indonesia dalam menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia akan kondisi yang terjadi di Xinjiang tersebut. Dalam komunikasi tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan tanggung jawab dan penghormatan akan HAM, kebebasan beragama, dan kepercayaan, kepada Duta Besar China (Augesti, 2018). Kemudian juga Indonesia beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak China dalam membahas isu pelanggaran HAM ini pada bulan Desember 2019.

Indonesia memandang isu ini sebagai permasalahan domestik China, di mana memang dianggap terdapat isu aksi separatisme di sana. Indonesia memilih tidak ingin terlibat dalam isu ini lebih jauh dikarenakan terdapat masalah yang mirip dalam masalah domestik Indonesia, yaitu terkait permasalahan gerakan separatisme di Papua yang sedang pemerintah Indonesia tangani. Selain itu, konsekuensi jika Indonesia tetap terlibat dalam isu tersebut akan berpeluang memperkuat posisi kelompok Islam radikal di Indonesia sendiri. Indonesia memilih untuk mengurus hubungan lainnya dengan China yang dianggap perlu mendapatkan perhatian lebih, misalnya pada urusan Laut China Selatan (IPAC, 2019). Hal ini kemudian membuat Indonesia untuk melakukan '*abstain*' dalam isu menindak isu ini, dan dengan itu Indonesia tidak menandatangani surat bersama pertama yang menentang kebijakan China maupun surat bersama kedua yang mendukung kebijakan China tersebut.

Tindakan Arab Saudi

Dalam menindak isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, Arab Saudi memilih untuk ikut menandatangani surat bersama kedua (surat dukungan) yang kemudian dikirimkan ke Dewan HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB. Arab Saudi menandatangani surat tersebut karena menganggap kebijakan pembangunan China sebagai langkah untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan. Menurut Arab Saudi, "pusat pelatihan" yang dibuat oleh pemerintah China di Xinjiang adalah langkah yang baik untuk muslim Uighur. Selain untuk menghilangkan ekstrimisme yang sering terjadi di Xinjiang, pelatihan tersebut memberikan pelatihan bagi muslim Uighur sehingga tenaga keahlian mereka dapat terserap oleh lapangan pekerjaan (Aryani, 2019). Ini kemudian dipertegas oleh pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah Al-Moullimi dengan menyatakan kepada public bahwa surat tersebut berisi tentang pembangunan China (Nichols, 2019).

Pada kunjungan kenegaraan Arab Saudi ke China, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyatakan dukungan dan penghormatan Arab Saudi terhadap hak-hak pemerintah China dalam mengambil tindakan kontra-terorisme dan de-ekstrimisme yang ditujukan untuk menjaga keamanan nasional China (Rufinaldo, 2019). Pers negara China memuji kunjungan itu sebagai bukti bahwa Arab Saudi berkomitmen dengan kemitraan strategis yang komprehensif dengan China dan dengan tegas mendukung upaya untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan stabilitasnya, dan menentang intervensi negara lain dalam urusan domestik negara. Kemudian juga menegaskan bahwa Arab Saudi akan mendorong kerja sama anti-terorisme, penegakan hukum dan keamanan, sekaligus meningkatkan pertukaran pengalaman tentang deradikalisasi (Xinhua, 2019).

Kesimpulan

Dalam menindak isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan tindakan yang diambil oleh Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2019. Indonesia memilih untuk *abstain*, dan Arab Saudi memilih untuk ikut kesertaannya dalam surat kedua yang merupakan dukungan untuk kebijakan China. Tindakan keduanya dilatarbelakangi oleh hubungan kerjasama antar keduanya dengan China, di mana Indonesia maupun Arab Saudi memiliki kepentingan nasional yang lebih menonjol dalam bidang ekonomi sebelumnya.

Bagi Indonesia, isu pelanggaran HAM di Xinjiang ini adalah sebagai bentuk pemerintah China dalam hal mengatur stabilitas domestik negaranya yang tidak perlu diintervensi oleh pihak luar negara China. Sikap ini didasari oleh Indonesia yang sangat memegang teguh prinsip non-intervensi. Permasalahan etnis Uighur dirasa memiliki kemiripan dengan kondisi di Indonesia, di mana terdapat konflik separatisme yang sering terjadi di Papua Barat. Selain itu, tindakan Indonesia yang memilih *abstain* ini juga dilatarbelakangi dari hubungan kerjasama Indonesia baik dalam bidang politik dan ekonomi. Pengaruh China dalam kedua bidang ini sangat menguntungkan Indonesia dalam nilai tawar internasional dan pembangunan negara.

Bagi Arab Saudi, kebijakan China yang dilakukan di Xinjiang itu perlu dilakukan dalam mencegah dan menghilangkan ekstrimisme yang sering terjadi di Xinjiang. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh komitmennya dalam melawan ekstrimisme. Arab Saudi juga memegang teguh prinsip non-intervensi seperti Indonesia, di mana isu domestic negara tidak boleh diintervensi pihak luar negara. Selain itu, hubungan Arab Saudi dan China juga menonjol pada bidang ekonominya yang sangat besar.

Daftar Pustaka

Andika, M. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy under Joko Widodo's Pro-People Diplomacy. Indonesian Perspective. *Indonesian Perspective*, 93-105.

Barlian, E. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jilid 1)*. Padang: Sukabinapress.

Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. United States of America: SAGE Publications, Inc.

Aryani, G. (2019). Arab Saudi Jelaskan Surat Dukungannya pada Kebijakan China di Xinjiang. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/966190/arab-saudi-jelaskan-surat-dukungannya-pada-kebijakan-china-di-xinjiang>

Augesti, A. (2018, Desember 19). Menlu Retno Sampaikan Keprihatinan RI atas Etnis Uighur ke Dubes China. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/3852769/menlu-retno-sampaikan-keprihatinan-ri-atas-etnis-uighur-ke-dubes-china>

BKPM. (2019). *Negara dengan Investasi Terbesar ke Indonesia 2019*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Blanchard, B. (2019, Maret 18). Reuters. Diakses melalui China says 13,000 'terrorists' arrested in Xinjiang since 2014: <https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-idUSKCN1QZ08T>

CNN Indonesia. (2019, September 26). *Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb-kecam-sikap-represif-china-ke-uighur>

Cumming-Bruce, N. (2018, Agustus 10). *New York Times*. Diakses melalui U.N. Panel Confronts China Over Reports That It Holds a Million Uighurs in Camps: <https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/asia/china-xinjiang-un-uighurs.html>

Dillon, M. (2020, Januari 1). *History Today*. Diakses melalui A Uighurs' History of China: <https://www.historytoday.com/archive/behind-times/uighurs%E2%80%99-history-china>

Gladney, D. C. (2004). *The Chinese Program of Development and Control, 1978-2001*. In S. F. Starr, *Xinjiang: China's Muslim Borderland*. Routledge.

HRW. (2018, September 9). *Eradicating Ideological Viruses*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>

HRW. (2019, Maret 7). *Letter from China*. Diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrcletterchina20190329.pdf

Huang, E. (2016, November 25). *Quartz*. Diakses melalui China is confiscating the passports of citizens in its Muslim-heavy region: <https://qz.com/845929/china-is-confiscating-the-passports-of-citizens-in-muslim-heavy-xinjiang-uyghur-autonomous-region/>

Human Right Watch. (2005). *Devastating Blows Religious Repression of Uighur in Xinjiang*. Human Right Watch.

IPAC. (2019). *Explaining Indonesia's Silence on The Uyghur Issue*. IPAC .

Kelemen, B., & Turcsanyi, R. Q. (2020). *It's the Politics, Stupid: China's Relations with Muslim Countries on the Background of Xinjiang Crackdown*. Asian Ethnicity.

Lau, M. (2019, Desember 5). *South China Morning Post*. Diakses melalui China's ethnic groups face end to affirmative action in education, taxes, policing: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3040577/chinas-ethnic-groups-face-end-affirmative-action-education>

Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. England: Awnsham Churchill.

Madu, L. (2015). Indonesia's Foreign Policy under President Joko Widodo: More Domestic and Nationalist Orientations. *Southeast Asia*, 189-197.

Miles, T. (2019, Juli 12). *Reuters*. Diakses melalui Saudi Arabia and Russia among 37 states backing China's Xinjiang policy: <https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-rights-idUSKCN1U721X>

Navlakha, M. (2019). *Belasan Negara Islam Membela Tiongkok di PBB Soal Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur*. Diakses melalui <https://www.vice.com/id/article/neaxyw/belasan-negara-islam-membela-tiongkok-di-pbb-soal-diskriminasi-terhadap-etnis-uighur>

Nichols, M. (2019, Juli 19). *Reuters*. Diakses melalui Saudi Arabia defends letter backing China's Xinjiang policy: <https://www.reuters.com/article/us-china-rights-saudi-idUSKCN1UD36J>

Permanent Mission of PRC to UN at Geneva. (2019, Juli 25). *Statement on behalf of the Like Minded Group during Dialogue with the UN High Commissioner for Human Rights*. Diakses melalui <https://www.mfa.gov.cn/ce/cegv//eng/hom/t1676719.htm>

Phillips, T. (2018, Januari 25). *The Guardian*. Diakses melalui China 'holding at least 120,000 Uighurs in re-education camps': <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/25/at-least-120000-muslim-uighurs-held-in-chinese-re-education-camps-report>

Rakhmat, M. Z., & Nughroho, A. S. (2019, Maret 20). *How Can Indonesia Take Advantage of the Belt and Road's Opportunities?* . Diakses melalui <https://thediplomat.com/2019/03/how-can-indonesia-take-advantage-of-the-belt-and-roads-opportunities/>

Ries, J. V. (2020). *Chinese-Made Drones: A Direct Threat Whose Use Should Be Curtailed*. Washington : The Heritage Foundation.

Rufinaldo, R. C. (2019, Februari 23). *Putra mahkota Saudi abaikan Uyghur selama kunjungan ke China*. Diakses melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/putra-mahkota-saudi-abaikan-uyghur-selama-kunjungan-ke-china/1400640>

Sitepu, A. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sriyanto, N. (2018). Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's Middlepowermanship in the East Asia Region. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1-18.

Sukma, R. (2009). Indonesia-China Relations: The Politics of Reengagement. *Palgrave Machimillan*, 89-106.

The Associated Press. (2020, 29). *AP NEWS*. Diakses melalui China cuts Uighur births with IUDs, abortion, sterilization: <https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-weekend-reads-china-health-269b3de1af34e17c1941a514f78d764c>

U. S Mission Geneva. (2019, Maret 13). *U.S.-Hosted Event on Protecting Fundamental Freedoms in Xinjiang, China*. Diakses melalui <https://geneva.usmission.gov/2019/03/13/u-s-hosted-event-on-protecting-fundamental-freedoms-in-xinjiang-china/>

V.

Wang, M. (2020, Februari 20). *Human Right Watch*. Diakses melalui More Evidence of China's Horrific Abuses in Xinjiang: <https://www.hrw.org/news/2020/02/20/more-evidence-chinas-horrific-abuses-xinjiang>

Xinhua. (2019, Februari 22). *China, Saudi Arabia agree to expand cooperation*. Diakses melalui http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/22/c_137842899.htm

Xinhua. (2019, Agustus 13). *Spotlight: Ambassadors from 37 countries issue joint letter to support China on its human rights achievements*. Diakses melalui http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/13/c_138222183.htm

Yellinek, R., & Chen, E. (2019, Desember 31). *China Brief*. Diakses melalui The “22 vs. 50” Diplomatic Split Between the West and China Over Xinjiang and Human Rights: <https://jamestown.org/program/the-22-vs-50-diplomatic-split-between-the-west-and-china-over-xinjiang-and-human-rights/>

Younes, A. (2019, Agustus 21). *Aljazeera*. Diakses melalui Activists hail Qatar withdrawal from pro-China text over Uighurs: <https://www.aljazeera.com/news/2019/8/21/activists-hail-qatar-withdrawal-from-pro-china-text-over-uighurs>